

**MITIGASI BENCANA GEMPA BERPOTENSI
TSUNAMI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik*



OLEH :

IRPAN ALNANDO LINGGA

17546/2010

PROGRAM STUDI

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2014

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Mitigasi Bencana Gempa Berpotensi Tsunami Oleh
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

Nama : Irpan Alnando Lingga

TM/NIM : 2010/17546

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

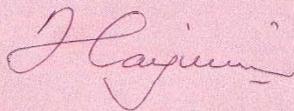
Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 08 Agustus 2014

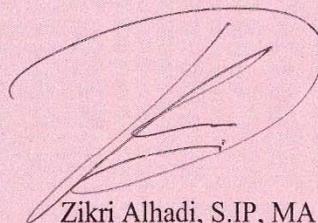
Disetujui oleh:

Pembimbing I



Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si
NIP: 19630617 198903 1 003

Pembimbing II



Zikri Alhadi, S.IP, MA
NIP: 19840606 200812 1 003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

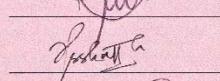
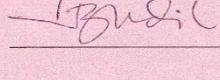
Pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2014 pukul 08.00 s/d 10.00 WIB

**Mitigasi Bencana Gempa Berpotensi Tsunami Oleh Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan**

Nama : Irpan Alnando Lingga
TM/NIM : 2010/17546
Progran Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Padang, 08 Agustus 2014

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	
Sekretaris	: Zikri Alhadi, S.IP, MA	
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D	
Anggota	: Siska Sasmita, S.IP. MPA	
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP.M,Si	



Mengesahkan:
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd.
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irpan Alnando Lingga

TM/NIM : 2010/17546

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Mitigasi Bencana Gempa Berpotensi Tsunami Oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan”** adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sesungguhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 08 Agustus 2014

Saya yang menyatakan,



Irpan Alnando Lingga
2010/17546

ABSTRAK
IRPAN LINGGA LINGGA : TM/NIM 2010/17546. MITIGASI BENCANA
GEMPA BERPOTENSI TSUNAMI OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rentannya Kabupaten Pesisir Selatan terhadap bencana gempa berpotensi tsunami sehingga menimbulkan keresahan terhadap masyarakat terutama yang berada dekat dengan bibir pantai. Sementara pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sudah berupaya dengan melakukan pembangunan beberapa sarana dan prasarana dalam mengatasi dampak yang akan terjadi dengan memberikan kewenangan kepada BPBD Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan upaya mitigasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi tentang upaya mitigasi, kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya mitigasi, serta manfaat mitigasi gempa berpotensi tsunami.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Koto XI Tarusan yaitu Kantor Camat Kecamatan Koto XI Tarusan, BPBD Kabupaten Pesisir Selatan serta masyarakat Kecamatan Koto XI Tarusan. Penentuan informan ditentukan secara *purposive*. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder melalui wawancara dan studi dokumentasi. Uji keabsahan dilakukan dengan triangulasi kemudian data dianalisis dengan cara mereduksi data, display data dan menarik kesimpulan selama penelitian dilakukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mitigasi bencana gempa berpotensi tsunami di Kecamatan Koto XI Tarusan secara umum sudah cukup berjalan sesuai yang di inginkan. Pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan dan BPBD sudah melakukan sosialisasi tentang kebencanaan dan pembangunan beberapa gedung sebagai shelter mitigasi bencana gempa berpotensi tsunami dan melakukan pendekatan dengan organisasi non-pemerintah dalam membantu upaya mitigasi. Namun masih terdapat kendala internal maupun eksternal dalam mitigasi bencana gempa berpotensi tsunami, sehingga perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan dalam mencapai hasil yang maksimal. Upaya yang dilakukan Pemerintah Koto XI Tarusan dan BPBD dalam mengatasi kendala-kendala mitigasi adalah dengan memanfaatkan kearifan lokal masyarakat sekitar, menambah sistim peringatan dini serta mengajukan penambahan anggaran khusus kepada pihak kabupaten selaku yang paling berwenang dalam menentukan pemberian anggaran.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Mitigasi Bencana Gempa Berpotensi Tsunami Oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan** “. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Selama menyusun skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, masukan serta fasilitas dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Sosial Politik.
3. Bapak Hadi Susilo S, SSTP selaku Camat Kecamatan Koto XI Tarusan, Bapak Firmanto S,IP selaku Kasi Ekonomi dan Pembangunan, Ibu Refa Linda Asyuni, AMK selaku Kasi Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan serta Bapak Dalvi Masyahari, ST selaku Staf Kasi kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Bapak Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A selaku pembimbing akademik.

5. Bapak Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si dan Bapak Zikri Alhadi, S.IP, MA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D, Ibu Siska Sasmita, S.IP, MPA dan Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si selaku tim penguji yang telah memberikan saran-saran dalam penyempurnaan skripsi ini.
7. Para dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah membimbing selama perkuliahan, serta segenap para pegawai yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis.
8. Orangtua dan keluarga yang tiada hentinya memberikan motivasi dan semangat secara moral maupun materil serta doa dan kasih sayang untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat dan rekan-rekan Jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2010 yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga segala bimbingan, motivasi, bantuan, masukan dan kritikan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama ini mendapat imbalan dari Tuhan dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Padang, September 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi, Batasan, dan Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Teoritis.....	13
B. Kerangka Konseptual.....	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Informan Penelitian.....	46
D. Jenis, Sumber Data.....	47
E. Teknik dan Pengumpulan Data.....	48
1. Uji keabsahan data dan teknik analisis data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Temuan penelitian.....	52
1. Temuan Umum.....	52
2. Temuan Khusus.....	58
B. Pembahasan.....	81
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 Rencana jalan alternatif Painan-Kambang.....	7
Gambar. 2 Siklus Manajemen Bencana	23

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN. 1 Surat Izin Penelitian

LAMPIRAN. 2 Surat Rekomendasi Kesbangpol

LAMPIRAN. 3 Surat Izin Melakukan Penelitian

LAMPIRAN. 4 Surat Melakukan Penelitian di Kecamatan Koto XI Tarusan

LAMPIRAN. 5 Pedoman Wawancara

DAFTAR TABEL

Tabel. 1	Persebaran Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan	3
Tabel. 2	Kecamatan yang paling berpotensi terkena dampak gempa berpotensi tsunami di Kabupaten Pesisir Selatan.....	5
Tabel. 3	Getaran gempa dan daya rusaknya	40

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bencana alam dapat terjadi dan mengancam kehidupan manusia kapan dan dimana saja tanpa kita mengetahui secara pasti akan terjadi karena tidak adanya tanda-tanda yang dapat meyakinkan manusia bahwa bencana itu akan terjadi, mungkin saja hari ini, besok atau bahkan ratusan tahun lagi, maka manusia hanya mampu melakukan antisipasi dampak yang akan ditimbulkan oleh bencana alam itu sendiri dengan tujuan dapat terhindar dari bencana yang akan terjadi. Untuk meminimalisir dampak bencana alam yang akan terjadi secara khusus gempa bumi berpotensi tsunami hal yang sangat dibutuhkan adalah kerjasama dari semua pihak yaitu partisipasi dari masyarakat di sekitar daerah rawan bencana serta campur tangan pemerintah setempat. Bencana alam bukan hanya kebakaran, banjir atau tanah longsor namun banyak bencana lain yang belum kita ketahui secara pasti seperti gempa berpotensi tsunami yang harus kita cari bersama jalan keluar untuk mengantisipasi ancaman bencana alam ini.

Gempa bumi berpotensi tsunami adalah pergerakan atau bergesernya lapisan bumi yang berasal dari atas atau bawah permukaan bumi atau meletusnya gunung api didasar lautan sehingga menyebabkan terjadinya gelombang laut yang sangat besar. Gempa berpotensi tsunami seperti ini sangat sering terjadi di Indonesia adalah akibat dari letak Indonesia yang berada pada tiga lempeng tektonik dunia. Indonesia juga berada pada jalur *The Pacific Ring of Fire* di samudera pasifik atau disebut dengan Cincin Api

Pasifik. Pada umumnya Negara-Negara yang dilalui jalur ini akan sering sekali terjadi gempa dan beberapa disertai gelombang tsunami serta bencana gunung berapi. (Sumber :www.Sindonews.com)

Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi yang paling rawan dengan ancaman gempa berpotensi tsunami dan dengan banyaknya wilayah yang berada pada pesisir pantai sudah selayaknya waspada dan lebih tanggap dalam upayaantisipasi dampak gempa berpotensi tsunami. Sumatera Barat secara khusus kota Padang bukan hanya sekali saja merasakan ancaman bencana seperti gempa dan tsunami tetapi sudah dapat dikatakan sebagai daerah yang sudah sangat sering terjadi gempa bumi yang sangat mengancam keselamatan masyarakat. Untuk memperkecil dampak dan resiko yang akan terjadi sangat dibutuhkan pemahaman dan kemauan untuk bisa berubah dan mempersiapkan segala cara dalam mengantisipasi dampak bencana gempa berpotensi tsunami ini, maka sangat dibutuhkan upaya antisipasi baik dari masyarakat sendiri dan tentunya bantuan dari pemko dan pemkab setempat.

Hal inilah menjadi pedoman yang mulai diikuti salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang mulai gencar dalam upaya antisipasi dampak bencana gempa dan tsunami, yaitu Kabupaten Pesisir Selatan yang memang berada tepat dibibir pantai dan sudah sangat sering terjadi gempa yang membuat kekawatiran yang sangat besar di kalangan masyarakat secara khusus masyarakat Pesisir Selatan. Pesisir Selatan terletak pada $0^{\circ} 59' - 2^{\circ} 28, 6'$ lintang selatan dan $100^{\circ} 19' - 101^{\circ} 18'$ dengan luas daerah $5.749,89 \text{ km}^2$ yang memanjang dari utara ke selatan dengan panjang pantai 234km. Posisi

geografis kabupaten Pesisir Selatan, sebelah utara berbatasan dengan kota Padang dan sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu, sebelah timur dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Provinsi Jambi dan sebelah barat dengan Samudera Indonesia.(Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan,2010).

Kabupaten Pesisir Selatan memiliki 57 buah pulau dan 27 buah sungai, 5 teluk dan panjang pantai yang mencapai 284, 82 km. Bila dirinci luas tanah di Kabupaten Pesisir Selatan menurut penggunaannya, komposisinya adalah 4,73 persen lahan sawah dan 96.27 lahan bukan sawah. Topografi daerah Kabupaten Pesisir Selatan bergunung dan berbukit-bukit, yang merupakan perpanjangan bukit barisan, dengan tinggi permukaan laut berkisar antara 0-1000 meter.(Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan,2010).

Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan tentang persebaran bencana di Kabupaten Pesisir Selatan dan kecamatan-kecamatan yang rentan terjadi bencana.

Tabel 1 Persebaran Bencana di kabupaten Pesisir Selatan

Lokasi Bencana	Jenis Bencana						
	Gempa	Tsunami	Banjir	Longsor	Puting Beliung	Gunung Api	Kebakaran
Koto XI Tarusan	V	V	V	V	V	-	V
Bayang	V	-	V	-	V	-	V
Bayang Utara	V	V	-	V	V	-	V
IV Jurai	V	V	-	V	V	-	V
Batang Kapas	V	V	V	V	V	-	V
Sutera	V	V	V	-	V	-	V
Lengayang	V	V	V	-	V	-	V
Ranah Pesisir	V	V	V	-	V	-	V
Linggo Sari Baganti	V	V	V	-	V	-	V
Pancung soal	V	V	V	V	V	-	V
Air Pura	V	V	V	V	V	-	V
Basa IV Balai tapan	V	-	V	-	V	V	V
Ranah IV Balai Tapan	V	-	V	-	V	V	V
Lunang	V	-	V	-	V	-	V
Lunang Silaut	V	V	V	-	V	-	v

Ket : v = berpotensi (-) = tidak berpotensi

Sumber : BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, 2013

Dari tabel diatas diketahui bahwa hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan terancam terkena dampak dari bencana gempa yang berpotensi tsunami jikalau terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan. Salah satunya yaitu kecamatan Koto XI Tarusan yang memiliki persebaran bencana yang merata dibanding beberapa kecamatan lainnya sehingga sangat dibutuhkan upaya mitigasi yang cepat dan tepat dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pemerintah Kecamatan Koto XI Tarusan dalam mengantisipasi dampak yang akan terjadi dengan membenahi beberapa fasilitas-fasilitas kritis yang menunjang terhadap antisipasi dampak gempa yang berpotensi tsunami mengingat minimnya upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah di Kecamatan Koto XI Tarusan seperti belum adanya sistim peringatan dini tsunami, pembangunan shelter dan akses jalur evakuasi berupa jalan raya yang belum memadai dibanding kecamatan lain yang berada di Kabupaten Pesisir Selatan.

Dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, berikut adalah 10 kecamatan yang paling berpotensi terkena dampak gempa yang berpotensi tsunami.

Tabel 2 Kecamatan Yang paling Berpotensi Terkena Dampak gempa berpotensi tsunami di kabupaten Pesisir Selatan

Kecamatan	Jumlah Jiwa
Koto XI Tarusan	17.589 jiwa
Bayang	7.235 jiwa
Batang Kapas	22.405 jiwa
Jurai IV	16.268 jiwa
Sutera	28.514 jiwa
Lengayang	25.132 jiwa
Ranah Pesisir	13.340 jiwa
Linggo Sari Baganti	16.491 jiwa
Pancung Soal	6731 jiwa
Lunang silaut	8.090 jiwa
Jumlah	161.435 jiwa

Sumber : BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, 2013

Dari data tabel diatas sangat jelas terlihat bahwa 10 kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah jiwa yang tidak sedikit akan terkena dampak bencana gempa yang berpotensi tsunami yang berarti ancaman yang sangat serius bagi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. kecamatan-kecamatan itu berada tepat pada bibir pantai di Kabupaten Pesisir Selatan, salah satunya Kecamatan Koto XI Tarusan yang berada pada urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak yang terancam terkena dampak gempa yang berpotensi tsunamiyang sama sekali belum memiliki shelter dibandingkan dengan kecamatan Pancung Soal dengan jumlah penduduk yang paling sedikit namun sudah memiliki shelter yang dapat dipergunakan jikalau terjadi gempa yang berpotensi tsunami.

Dalam menciptakan rasa aman terhadap masyarakat di semua kecamatan yang rawan dampak gempa dan tsunami Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan berbagai tindakan mitigasi yang sangat diperlukan oleh masyarakat terutama yang berada tepat pada garis pantai. Pemerintah berupaya membangun beberapa shelter yang dapat membantu mengurangi jumlah korban jiwa akibat dampak gempa berpotensi tsunami. Shelter adalah bangunan yang dipergunakan untuk tempat pengungsian masyarakat jikalau gempa berpotensi tsunami terjadi. Shelter ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu shelter alami dan shelter buatan. Shelter alami atau yang sering juga disebut shelter vertikal yaitu dapat berupa tempat tinggi atau perbukitan dan shelter horizontal yang berupa tempat evakuasi yang memiliki jarak yang lumayan jauh yang dipastikan aman dari hempasan tsunami, sedangkan shelter buatan dapat berupa gedung-gedung yang tinggi seperti sekolah atau tempat ibadah.

Upaya-upaya lain yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah pembangunan jalan alternatif, tangga evakuasi dan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar tentang apa sebenarnya gempa berpotensi tsunami, dampak, serta bagaimana cara menanganinya sehingga pemerintah dapat menjalankan tugas dengan baik dengan adanya bantuan dari masyarakat berupa pemahaman yang baik dan benar tentang bagaimana mengantisipasi bencana itu

Berikut ini adalah gambar pembangunan jalur alternatif yang dicanangkan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengantisipasi resiko yang terjadi jikalau terjadi gempa berpotensi tsunami.

Gambar 1 Rencana Jalan Alternatif Painan-Kambang



Sumber : BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, 2013

Pembangunan shelter dan jalur evakuasi diusahakan untuk dikerjakan dengan cepat, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyiapkan rancangan jalan yang akan dibangun untuk digunakan oleh masyarakat sebagai jalur alternatif evakuasi jika terjadi gempa berpotensi tsunami di Pesisir Selatan. Jalan alternatif ini nantinya akan digunakan masyarakat untuk menyelamatkan diri dari bahaya yang ditimbulkan bencana gempa berpotensi tsunami. Jalan alternatif yang akan dibangun ini memiliki panjang sekitar 16 km yang dibagi menjadi empat jalur alternatif antara lain :

- 1) Simpang Lakuk PLN – Simpang Pasar Gompong 2.100m
- 2) Simpang Lakuk PLN – Simpang Lubuk Sarik – Simpang Pasar Gompong 2.500m
- 3) Simpang Lakuk PLN – Simpang Padang Panjang – Simpang Pasar Gompong 3.800m

4) Amping Parak – Tanjung Gadang – Pasar Kambang 7.300m.
(Sumber : BPBD Kabupaten Pesisir Selatan 2013)

Empat alternatif jalan yang akan dibangun ini diharapkan dapat membantu masyarakat Pesisir Selatan dalam mengantisipasi dampak gempa dan tsunami sehingga jumlah korban jiwa dapat dikurangi dengan adanya pembangunan jalan alternatif ini. Masyarakat disarankan untuk menggunakan jalan alternatif ini nantinya untuk menyelamatkan diri ketempat yang aman dari jangkauan ancaman gempa berpotensi tsunami sehingga masyarakat tidak akan terlalu khawatir terhadap dampak dan ancaman tsunami.

Seperti dikutip Harian Haluan (Rabu, 3 Oktober 2012), salah satu pembangunan infrastruktur mitigasi yang saat ini sedang diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah pembangunan shelter berupa jalan raya. Terkait dengan itu daerah pesisir membutuhkan setidaknya 96 buah shelter pada titik-titik rawan, daerah ini juga membutuhkan sekitar 16 ruas jalan dan jembatan evakuasi tsunami dengan panjang sekitar 223 km, disamping program pelatihan siaga dan simulasi bencana.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Nasrul Abit selaku Bupati Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 3 Oktober 2012 yang dikutip dari Harian Haluan bahwa sebagian besar wilayah Pesisir Selatan masuk zona merah bencana, karena mayoritas masyarakat Pesisir Selatan, berdomisili dalam radius 0-3 km dari bibir pantai. Hal ini jika terjadi bencana akan mengancam nyawa 243.000 jiwa warga. Diwaktu yang sama keseriusan akan upaya mitigasi bencana juga dipertegas kembali oleh Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit pada tanggal 3 Oktober 2012 yang dikutip melalui Harian Haluan mengatakan bahwa hingga

saat ini, sudah selesai pembangunan beberapa gedung milik pemerintah yang juga berfungsi sebagai shelter, seperti SDN Amping Parak, Kecamatan Sutera dan SDN Kecamatan Pancung serta shelter Mesjid Raya Painan yang dalam pengerjaan.

Pemerintah Pesisir Selatan juga masih kurang optimal dalam upaya mitigasi bencana yang akan difungsikan di Kabupaten Pesisir Selatan hal ini tampak dari sekian shelter dan fasilitas kritis yang diperlukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan hanya sedikit yang sudah terealisasi dan dalam masa pengerjaan. Kabupaten Pesisir Selatan sampai sekarang hanya memiliki 2 shelter yaitu shelter Ex TMP Painan dan Shelter Pasir Ganting di Kecamatan Pancung Soal. Shelter ini hanya berada di 2 Kecamatan saja padahal dari 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan 10 diantaranya rawan gempa dan tsunami yang juga sangat membutuhkan shelter. Begitu juga dengan jalur evakuasi Pemerintah baru Membangun 4 ruas jalur evakuasi (Painan-Kambang) sejauh 15,7km. Hal lain yang sudah dikerjakan adalah tangga evakuasi menuju tempat yang tinggi, namun tangga evakuasi ini juga kurang mendapat perawatan dan luas tangga yang kurang maksimal untuk jalur evakuasi. (*Sumber : BPBD Kabupaten Pesisir Selatan,2013*).

Keseriusan Pemerintah Pesisir Selatan dalam mengantisipasi dampak gempa berpotensi tsunami juga tidak lepas dari sorotan karena minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah Pesisir Selatan terhadap masyarakat sekitar tentang pengetahuan bencana dan upaya penyelamatan jikalau gempa terjadi sangat kurang karena sosialisasi tidak menjangkau daerah-daerah yang

terpencil dan hanya memusat di beberapa kecamatan saja, hal lain yang menjadi perhatian juga adalah belum berfungsinya secara maksimal sistem peringatan dini seperti alarm peringatan dini tsunami. Sumatera Barat baru memiliki 15 alarm peringatan dini tsunami yaitu 9 buah di pesisir pantai Padang dan sisanya 6 buah ditempatkan di Kabupaten Agam, Pariaman dan Pesisir Selatan, dengan data ini dapat disimpulkan Kabupaten Pesisir Selatan hanya memiliki 2 alarm peringatan Tsunami hal ini jelas sangat kurang mengingat luas wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis lebih dalam tentang penerapan mitigasi bencana sehingga masyarakat merasa lebih aman karena adanya upaya dalam meminimalisir dampak gempa berpotensi tsunami, sehingga penulis tertarik melanjutkan dengan judul penelitian **Mitigasi Bencana Gempa Berpotensi Tsunami Oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi permasalahan yang mungkin dapat diteliti :

1. Kurang optimalnya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mempersiapkan mitigasi di Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Masih belum meratanya fasilitas kritis seperti jalur dan lokasi evakuasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Masih minimnya sosialisasi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan terkait pengetahuan kebencanaan dan penyelamatan diri di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Belum bekerjanya sistem peringatan dini secara optimal yang menjangkau seluruh masyarakat di daerah rawan bencana gempa berpotensi tsunami.

C. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya ancaman bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat secara khusus di Kabupaten Pesisir Selatan oleh karena itu penulis tidak mungkin melakukan penelitian secara menyeluruh dan karena keterbatasan waktu, biaya serta tenaga dan kemampuan penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis membatasi masalah pada mitigasi bencana gempa berpotensi tsunami di Kecamatan Koto XI Tarusan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mitigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pesisir Selatan ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalamantisipasi dampak bencana gempa berpotensi tsunami ?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengantisipasi kentaladampak gempa berpotensi tsunami ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Mitigasi bencana gempa berpotensi tsunami.

2. Kendala-kendala dalam antisipasi dampak bencana gempa berpotensi tsunami.
3. Manfaat dari antisipasi dampak gempa berpotensi tsunami.

F. Manfaat penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat maupun Pemerintah khususnya berkaitan dengan Kebijakan Publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya kajian tentang Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik.
2. Secara praktis.
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengambil kebijakan untuk dapat senantiasa tanggap dalam upaya antisipasi dampak gempa dan tsunami.
 - b) Sebagai masukan dan bahan berpijak bagi pembaca dan peneliti selanjutnya yang akan meneliti dampak bencana gempa dan tsunami sehingga dapat meminimalisir dampak yang akan ditimbulkan.